Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 5
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PEMETAAN BATAS ADMINISTRASI JORONG SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM DIGITALISASI NAGARI TAEH BARUAH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Mapping of Jorong Administrative Boundaries as a Support for the Digitalization Program of Nagari Taeh Baruah, Lima Puluh Kota Regency

Hidayatul Umiro[1], Zulminiati[2], Cyndy Novelia Amri[3], Silvia Alismarni[4], Afifah Khairunnisa[5], Excel Putra Pratama[6]

[1]Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, [2]Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang, [3]Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, [4]Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang, [5]Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, [6]Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Alamat Korespondensi : hidayatulumiro@gmail.com, zulminiati@fip.unp.ac.id. cindynoveliaamri@gmail.com, Salismarni@gmail.com, afifahkhairunnisa233@gmail.com, excelputrapratama6@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan batas administrasi jorong sebagai bentuk dukungan terhadap program digitalisasi pemerintahan Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data spasial diperoleh melalui analisis citra satelit dan pengukuran lapangan, yang kemudian diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Peta yang dihasilkan merepresentasikan batas wilayah jorong secara jelas dan terstruktur, serta berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengawasan wilayah. Pemetaan ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat digitalisasi administrasi nagari melalui penyediaan data spasial yang akurat dan transparan. Pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan partisipatif turut meningkatkan akurasi serta legitimasi data batas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peta administrasi batas jorong berdampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik, penyelesaian konflik batas, dan tata kelola wilayah secara digital. Dengan demikian, peta ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung transformasi digital di tingkat pemerintahan nagari.

Kata kunci: batas administrasi, jorong, digitalisasi nagari, sistem informasi geografis (SIG), pemetaan partisipatif

ABSTRACT

This study aims to map the administrative boundaries of jorong (hamlets) to support the digitalization program of village governance in Nagari Taeh Baruah, Lima Puluh Kota Regency. The activity was conducted by the Community Service Program (KKN) team from Universitas Negeri Padang using a descriptive qualitative method with a case study approach. Spatial data were obtained

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 519
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/krepa.v1i2.365
Copyright : Krepa



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

through satellite imagery analysis and field measurements, which were then processed using Geographic Information Systems (GIS). The resulting map clearly and structurally visualizes the administrative boundaries of each jorong, serving as a foundation for development planning, natural resource management, and territorial supervision. This mapping initiative also contributes to the acceleration of administrative digitalization by providing accurate and transparent spatial data. The use of participatory mapping involving local communities enhanced the accuracy and legitimacy of the boundary data. The results show that the administrative boundary map positively impacts public service effectiveness, boundary conflict resolution, and digital-based territorial governance. Thus, the map becomes a strategic instrument in supporting the digital transformation of local government at the nagari level.
Keywords: administrative boundaries, jorong, nagari digitalization, geographic information systems (GIS), participatory mapping

PENDAHULUAN

Nagari Taeh Baruah, yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, merupakan wilayah dengan karakteristik administratif yang khas. Nagari ini terdiri dari enam jorong yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Keberadaan peta administrasi batas jorong menjadi hal yang sangat penting untuk pengelolaan wilayah yang efektif. Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, peta administrasi yang akurat dapat mendukung efisiensi pengelolaan data dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Peta administrasi batas jorong ini sangat berguna dalam mendukung program-program pemerintah daerah, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi (Stiyanto et al., 2025).

Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), kelompok KKN melaksanakan pembuatan peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah. Pembuatan peta ini bertujuan untuk membantu digitalisasi administrasi nagari yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Peta administrasi yang dibuat tidak hanya sebagai alat visual, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pemukiman, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Digitalisasi administrasi nagari diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wilayah.

Peta administrasi batas jorong yang telah dibuat oleh Kelompok KKN diharapkan dapat digunakan dalam berbagai aspek pemerintahan nagari. Misalnya, dalam hal pengelolaan batas wilayah, pengembangan sarana dan prasarana, serta dalam upaya mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan teknologi informasi dalam pemerintahan yang semakin meningkat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwanto et al., (2023) teknologi peta administrasi yang terintegrasi dalam sistem digital akan mempercepat proses administrasi dan mempermudah pengelolaan wilayah secara lebih efisien.

Dalam konteks digitalisasi nagari, keberadaan peta administrasi yang jelas dan akurat menjadi komponen utama. Peta ini tidak hanya digunakan untuk tujuan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Aromatica et al. (2024) tantangan terbesar dalam digitalisasi nagari adalah keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memanfaatkan peta digital ini secara optimal.

Selain itu, pembangunan peta administrasi batas jorong juga menjadi alat penting untuk memetakan potensi dan masalah yang ada di setiap jorong. Peta ini memberikan gambaran yang jelas tentang topografi wilayah, pembagian lahan pertanian, pemukiman, serta fasilitas umum

yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmat & Mesra (2024)penggunaan peta dalam pemerintahan desa atau nagari sangat mendukung dalam perencanaan wilayah dan pengambilan keputusan yang berbasis data spasial. Dengan demikian, peta administrasi batas jorong dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan yang lebih tepat dan efisien.

Peta administrasi batas jorong yang telah disusun oleh tim KKN UNP di Nagari Taeh Baruah juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah nagari dan masyarakat. Peta ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta mempercepat penyelesaian masalah administratif yang ada. Dengan demikian, peta ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah nagari, tetapi juga bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, sebagaimana disarankan oleh (Nurdin & Rido, 2020)

METODE KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pembuatan peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah dan dampaknya terhadap digitalisasi wilayah tersebut. Menurut Sugiyono (2023) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembuatan peta, tetapi juga mengevaluasi implementasi peta administrasi dalam mendukung digitalisasi pemerintahan nagari. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis spasial dan proses digitalisasi yang terjadi setelah peta administrasi batas jorong selesai dibuat oleh tim KKN UNP. Metode ini memungkinkan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana peta dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah dan pelayanan publik berbasis data.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi langsung terhadap proses pembuatan peta, wawancara dengan masyarakat setempat, dan penggunaan perangkat SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk menganalisis data spasial. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data spasial, seperti koordinat batas jorong yang diperoleh melalui survei lapangan dan citra satelit, serta data demografis Nagari Taeh Baruah yang diperoleh dari sumber resmi selama kegiatan KKN UNP. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2023)pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam sangat efektif untuk menggali informasi dari subjek yang memiliki pemahaman langsung terhadap fenomena yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak GIS untuk memverifikasi dan menyusun peta administrasi batas jorong yang akurat, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan nagari.

Waktu dan Tempat kegiatan :	17 Juli 2025, di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Objek/sasaran/mitra :	Mitra kegiatan melibatkan berbagai elemen masyarakat Nagari Taeh Baruah, seperti pelajar (termasuk anak-anak), anggota Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta perangkat nagari yang turut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program.
Jumlah kk/anggota mitra terlibat :	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini diperkirakan sekitar 11 orang.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 5
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Metode pelaksanaan kegiatan :	Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif, dimulai dari observasi, wawancara, dan diskusi untuk mengidentifikasi masalah utama.

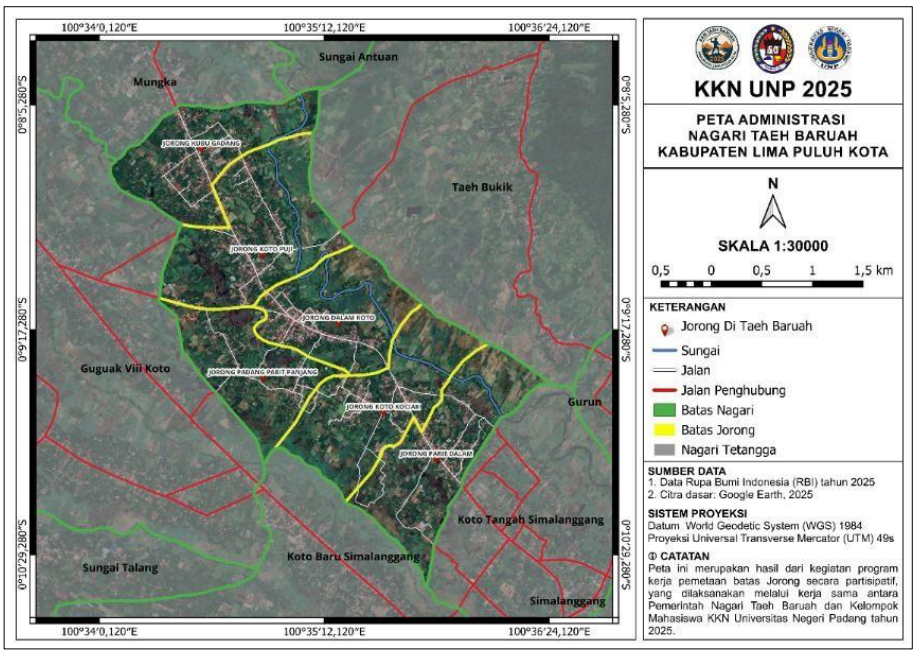
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah adalah langkah yang sangat penting dalam mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik dan berbasis data. Sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), tim KKN diberi tanggung jawab untuk menghasilkan peta yang dapat membantu digitalisasi pengelolaan wilayah di Nagari Taeh Baruah. Pembuatan peta ini dimulai dengan pengumpulan data spasial, yang mencakup koordinat batas jorong yang diperoleh dari survei lapangan dan citra satelit. Proses ini melibatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis data spasial dengan presisi yang tinggi. Penggunaan SIG dalam pembuatan peta administrasi telah terbukti sangat efektif dalam menghasilkan peta yang akurat, sehingga peta ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

Menurut Rohmadiani et al. (2022)pembuatan peta administrasi dengan SIG sangat penting untuk mendukung pengembangan daerah karena memungkinkan pemerintahan untuk memiliki alat yang dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam dan pemukiman dengan lebih efisien. Peta yang dihasilkan bukan hanya menggambarkan batas wilayah, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang struktur geografis dan sosial-ekonomi di setiap jorong. Kendati demikian, pembuatan peta administrasi batas jorong ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi tim KKN UNP adalah keterbatasan dalam pengumpulan data di lapangan, terutama mengingat kondisi geografis Nagari Taeh Baruah yang berbukit dan sulit dijangkau oleh kendaraan. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi yang akurat mengenai batas-batas wilayah yang jelas, yang seringkali menjadi masalah klasik di daerah-daerah pedesaan.

Untuk mengatasi tantangan ini, tim KKN UNP berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat tentang batas-batas wilayah. Pendekatan pemetaan partisipatif, seperti yang dilakukan oleh Luis et al. (2021)dalam penelitian mereka tentang penyusunan peta desa, menjadi solusi efektif. Dalam metode ini, masyarakat yang tinggal di masing-masing jorong diberdayakan untuk memberikan informasi terkait batas wilayah mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang sangat berguna dalam memastikan akurasi peta yang dibuat. Hal ini memungkinkan peta yang dihasilkan tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat setempat karena mereka turut serta dalam proses pembuatan peta. Dengan pendekatan ini, meskipun ada kendala teknis dalam pengukuran dan pencatatan data lapangan, peta yang dihasilkan menjadi lebih representatif dan bermanfaat.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 5
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784



Gambar 1. Peta Administrasi Batas Jorong Nagari Taeh Baruah

Setelah peta administrasi batas jorong berhasil dibuat, peta ini menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung digitalisasi administrasi di Nagari Taeh Baruah. Peta administrasi digital yang dihasilkan oleh tim KKN UNP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai alat untuk mendigitalisasi seluruh proses pemerintahan nagari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rendra et al. (2024) pembuatan peta yang berbasis teknologi digital sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah.



Gambar 2. Penyerahan Secara Simbolis Bingkai Foto Peta Administrasi Kepada Walinagari

Digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi sangat penting dalam konteks saat ini, di mana hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada teknologi. Salah satu manfaat utama dari peta administrasi digital adalah kemudahan akses informasi yang lebih cepat dan transparan. Masyarakat dan pemerintah dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait batas wilayah, hak kepemilikan tanah, serta rencana pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Alpiana

et al. (2022)dalam penelitian mereka mengenai pembuatan peta administrasi di desa Teros, Lombok Timur, menunjukkan bahwa digitalisasi peta tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga mempermudah komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dalam hal penyampaian informasi terkait kebijakan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam.

Dengan adanya peta digital, pemerintah nagari dapat memonitor kondisi wilayah secara lebih real-time. Misalnya, dengan data yang akurat mengenai batas jorong, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan di daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian, seperti daerah dengan akses terbatas atau daerah rawan bencana. Saputro et al. (2021) mengungkapkan bahwa penggunaan peta digital berbasis SIG juga mempermudah pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Peta digital yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam, yang sangat berguna dalam proses perencanaan jangka panjang.



Gambar 3. Pendirian Peta Administrasi di Halaman Kantor Walinagari Taeh Baruah

Peta administrasi batas jorong yang dihasilkan oleh tim KKN UNP memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengelolaan wilayah di Nagari Taeh Baruah. Salah satu dampak utama yang dapat diidentifikasi adalah kemampuannya dalam perencanaan pembangunan. Dengan peta yang akurat, pemerintah nagari dapat lebih mudah merencanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peta ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi sumber daya alam di setiap jorong, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara lebih efisien. Fisko (2015) dalam penelitiannya tentang pentingnya peta desa menyatakan bahwa peta administrasi desa sangat membantu dalam merencanakan pembangunan yang lebih sistematis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Peta administrasi ini memungkinkan pemerintah untuk memetakan wilayah yang membutuhkan pembangunan lebih dahulu, serta mengalokasikan dana pembangunan secara lebih efektif.

Lebih lanjut, peta administrasi ini berfungsi sebagai alat bantu yang sangat efektif dalam pengawasan wilayah. Peta ini memungkinkan pemerintah untuk memantau penggunaan lahan, perkembangan infrastruktur, dan perubahan dalam wilayah jorong dengan lebih mudah. Dalam hal ini, peta berperan dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Rendra et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan peta administrasi dalam pengelolaan desa memberikan manfaat besar dalam mengurangi konflik terkait batas wilayah dan meningkatkan

ISSN 2988-3059 **Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**
Cahaya Ilmu Bangsa

transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, peta administrasi batas jorong ini juga menjadi alat yang sangat penting dalam hal penegakan hukum terkait batas wilayah. Peta yang jelas dan akurat memungkinkan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan lebih mudah dan adil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Luis et al. (2021) penggunaan peta administrasi dalam pemerintahan desa sangat membantu dalam menghindari konflik yang sering terjadi karena ketidakjelasan batas wilayah. Dengan peta yang sudah tersedia dan terbukti valid, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat mengakses informasi dengan mudah dan menghindari kebingungan yang bisa menyebabkan perselisihan.

Peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah memiliki dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah dan akuntabilitas pemerintahan nagari. Peta ini tidak hanya digunakan untuk perencanaan dan pengawasan wilayah, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat dan berbasis data.

Pembuatan peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan wilayah. Dengan pemetaan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga turut serta dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka. Rohmadiani et al. (2022) mengungkapkan bahwa pemetaan yang melibatkan masyarakat akan menghasilkan peta yang lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Melalui peta administrasi batas jorong, Nagari Taeh Baruah kini memiliki alat yang dapat mendukung proses digitalisasi pemerintahan nagari dengan lebih baik. Pemerintah nagari dapat memanfaatkan peta ini dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengawasan wilayah, dan penegakan hukum. Dengan demikian, peta administrasi batas jorong ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih berbasis data dan lebih efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuatan peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan wilayah dan digitalisasi pemerintahan di tingkat nagari. Peta yang dihasilkan oleh tim KKN UNP tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai batas wilayah jorong, tetapi juga menjadi alat yang mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan efisien. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pembuatan peta ini memungkinkan data spasial yang lebih akurat dan mudah diakses, sehingga mempercepat proses administrasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala geografis dan aksesibilitas, penerapan pendekatan pemetaan partisipatif terbukti efektif dalam menghasilkan peta yang lebih valid dan diterima oleh masyarakat setempat. Dampak positif dari peta ini sangat terasa dalam pengelolaan wilayah, pengawasan pembangunan, dan penegakan hukum terkait batas wilayah. Ke depan, peta administrasi batas jorong di Nagari Taeh Baruah diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses digitalisasi pemerintahan di nagari tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Padang (UNP) yang telah memberikan kesempatan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta kepada Pemerintah Nagari Taeh Baruah dan seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan peta administrasi batas jorong ini. Terima kasih juga kepada pihak

yang telah menyediakan fasilitas dan akses yang memadai, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Alpiana, Rahmawati, D., Firaz, M. F., Ariyanto, Matrani, B. F. A., & Adiansyah, Safaat. J. (2022). Bantuan Teknis Pembuatan Peta Administrasi Untuk Desa Teros, Lombok Timur Technical Assistance For

Administrative Map Development For Teros Village, East Lombok. *TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, *2*(2), 2797–7838. http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index

Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Nazirwan, & Netti, H. (2024). *Membangun Desa dengan Revolusi Digital* (A. Hendrayady, Ed.; 1st ed.). Mega Press Nusantara.

Fisko. (2015). Pentingnya Peta Desa. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, *1*(1), 69–73.

Luis, R. R. A., Dharmawan, M. O., & Priyono. (2021). Penyusunan Peta Desa Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Hibah Peta di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. *Abdi Geomedisains*, *2*(1).

Nurdin, M. A., & Rido, A. (2020). *IDENTITAS DAN KEBANGGAAN Menjadi Orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air* (1st ed.). Hipius (Himpunan Peminat Ilmuilmu Ushuluddin).

Purwanto, T. D., Paramitha, N., & Agustin, W. (2023). Strategi Digitalisasi Desa Menjadi Desa Modern Kecamatan Cambia Kota Prabumulih. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma)*, *3*(1), 62–71.

Rahmat, R., & Mesra, R. (2024). Batas Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum dan Perorangan Menjadi Peran Kunci dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa atau Nagari di Nagari Padang Lua Kecamanatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)*, *1*(1), 46–55.

Rendra, M. I., Huda, M. M., Sandy, R. A., Roisewajid, S., Saputra, R. Y., & Abrori, A. N. (2024). Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh*, *6*(1), 847–856.

Rohmadiani, L. D., Shofwan, M., Widyastuty, A. A. S. A., Tribhuwaneswari, A. B., & Rukmana, S. N. (2022). Pembuatan Peta Administrasi Sebagai Pendukung Pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, *2*(2).

Saputro, Dari, D. R., & Widyaningsih, P. (2021). Pelatihan Pembuatan Peta Digital Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Desa Rejoso. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *4*(4), 51–56.

Stiyanto, E., Falah, M. F., Mahardika, T., Prices, A. P., & Trinanda, Y. (2025). Pembuatan Foto Udara untuk Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman. *Sarwahita*, *22*(01). https://doi.org/10.21009/sarwahita.221.8 Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.